

ISU *GLOBAL WARMING* DAN SIKAP DUNIA INTERNASIONAL

Diah Ayu Pratiwi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan

Email: diah_mahdan@yahoo.co.id

Abstract

The issue of global warming discourse and international attention today. It is characterized by proliferation and increasingly intense international conferences that discuss the issue. This article aims to analyze and identify the issue of global warming as an issue of non-conventional and knowing how the international attitude towards the issue and where the direction of policy foreign countries tackle the issue of global warming. This paper uses descriptive qualitative research methods. From this article we concluded the current attitude of the international community concerned about the issue of global warming. Broadly speaking, the international negotiations on global warming and climate change involves two main camps, which developed countries (industrialized countries) and developing countries. Although sometimes stagnated, international conference on global warming and climate change continue to be done by the countries in the world to achieve a win-win solution. It is solely in order to achieve the basic objective, namely the achievement of prosperity and peace the real world.

I. Pendahuluan

Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 membuka sejarah baru bagi konstelasi politik Eropa dan dunia. Berdasarkan hasil kesepakatan Westphalia, konsep legal tentang kedaulatan negara-bangsa (*state-nation*) dan institusionalisasi terhadap kekuatan militer dan diplomasi disepakati bersama oleh para penguasa di Eropa melalui konsensus. Sumbangan pemikiran dan hasil kesepakatan Westphalia bagi sistem pemerintahan moderen negara-negara di dunia masih relevan dan terus berkembang hingga sekarang, yaitu bahwa para penguasa atau kedaulatan-kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah yang sama.¹

Berangkat dari terbentuknya legalitas kedaulatan negara-negara moderen dan institusionalisasi perangkat sistemik negara moderen itu, dalam perkembangannya negara (pemerintah) sebagai pemegang mandat dari kedaulatan rakyatnya dan satu kesatuan entitas politik memiliki hak-hak istimewa atas kodifikasi Undang-Undang dalam

¹ John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics* Third Edition, (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 29-30.

negerinya, penggunaan kekerasan untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkannya, dan penggunaan kekuatan militer untuk melindungi segenap tumpah darahnya, maupun untuk tujuan menjalankan politik luar negerinya.² Idealnya, dengan sistem baru yang terbentuk dan dikembangkan itu setiap negara dunia dapat mencapai tujuannya masing-masing dan dapat menghormati kedaulatan negara-negara lain. Akan tetapi, dalam dinamikanya hal yang menarik untuk kita simak adalah bahwa penggunaan kekuatan militer oleh banyak negara dunia hingga kajian perimbangan kekuasaan (konsep *balance of power*) begitu kental mewarnai dinamika politik internasional, setidaknya hingga berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni-Soviet (1991) sebagai simbol monumental yang dapat kita ambil sebagai contoh.

Masa pascaperang dingin, secara nuansa dan substantif, diperkaya dengan bergesernya paradigma universial yang tadinya hanya berkuat tentang isu konvensional (tradisional) seperti kekuatan militer dan perang-perang berskala besar semata, kini juga dilengkapi dengan mengaburnya batas kedaulatan negara akibat isu-isu global (isu-isu nonkonvensional) yang tidak mengenal sekat dan tingginya interdependensi antarnegara dunia.³ Sebelum era tahun 1990-an, atau persisnya selama masa Perang Dunia I dan II hingga era Perang Dingin, isu-isu keamanan nasional dan/atau kekuatan militer secara dominan merupakan dasar utama dari kebijakan politik luar negeri mayoritas negara dunia.⁴

Meskipun demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya itu tidak berarti bahwa isu nonkonvensional baru muncul setelah era Perang Dingin. Perjuangan terhadap isu nonkonvensional pada level internasional sudah tercermin sejak 10 Desember 1948, yakni ketika Majelis Umum PBB mencanangkan Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).⁵ Isu-isu nonkonvensional mulai dipandang sebagai salah satu bentuk ancaman keamanan maupun terhadap kepentingan nasional berbagai negara. Hal ini dimungkinkan karena studi-studi

² John T. Rourke, *International Politics on the World Stage* Tenth Edition, (New York: McGraw Hill Inc., 2005), terutama hlm. 164-172).

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional* Edisi Kedua, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2005), hlm. 720-721.

⁴ Joseph S. Nye, Jr., *Understanding International Conflicts Second Edition*, (New York: Longman Inc., 1997), terutama hlm. 50-59 yang membahas tentang konsep *balance of power* dan konsep *power* itu sendiri, beserta implementasinya dalam kebijakan luar negeri.

⁵ Untuk penjelasan mendalam, lihat Boer Mauna, *op.cit.*, terutama subbab Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia hlm. 679-691.

tentang strategi-keamanan kini lebih dipandang secara luas, ketimbang terfokus pada penggunaan kekuatan militer semata. Konflik tidak lagi dipandang dalam konteks kekerasan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata, dan ancaman terhadap suatu negara tidak lagi dipersepsikan secara gamblang oleh datangnya kekuatan militer dari negara lain.⁶

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi *global warming* sebagai isu non konvensional dan mengetahui bagaimana sikap dunia internasional terhadap isu tersebut serta kemana arah kebijakan Negara-negara luar mengatasi *global warming*.

II. Dasar Pemikiran

Semakin pesatnya pembangunan ekonomi global dan saling ketergantungan (*interdependency*) antara negara-negara di dunia memunculkan masalah-masalah seperti degradasi lingkungan hidup, terorisme, demografi penduduk (termasuk di dalamnya masalah migrasi tenaga kerja), penyebaran epidemi atau jenis penyakit baru seperti HIV/AIDS yang kemudian secara signifikan dianggap memengaruhi keamanan suatu negara atau antarnegara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁷

Dalam kajian tradisional atau sering disebut perspektif realis, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Namun, kecenderungan itu berubah dalam wacana-wacana moderen, dan menimbulkan kritik terhadap bentuk keamanan yang muncul dari kalangan neorealis dan globalis. Neorealis mengkritik realisme yang cenderung hanya menganggap aktor Negara sebagai satu-satunya aktor dominan dalam dinamika politik internasional, sedangkan globalisasi memiliki ciri-ciri revolusi teknologi informasi dan komunikasi, serta aktor-aktor nonnegara yang dapat mengubah secara signifikan peta politik internasional.⁸ Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa perspektif realis murni sudah tidak mampu lagi merepresentasikan keadaan dunia saat ini. Ken Booth kemudian mulai memasukkan isu-

⁶ Kuliah Umum Mayjen. Syarifudin Tippe, SIP, Msi, *Indonesia Terjebak dalam Perang Moderen*, 2 Agustus 2004. http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/040802_prngmodrn_li/

⁷ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional* vol. II, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), terutama hlm. 477-492.

⁸ John Baylis & Steve Smith, *op.cit.*, hlm. 621-641 untuk pembahasan mendalam tentang revolusi teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap globalisasi, dan bab XIX tentang aktor-aktor nonnegara.

isu seperti peran organisasi internasional/*Non Governmental Organization* (NGO), lingkungan hidup, demokrasi, terorisme, kebijakan publik, kesenjangan yang terjadi antar Negara-negara Utara-Selatan, dan bahkan feminisme sebagai bagian dari kajian keamanan.⁹

Dalam isu keamanan kontemporer banyak dimensi yang kemudian diperbincangkan dalam isu keamanan nonmiliter atau nonkonvensional (*non-conventional threat*). Contoh-contoh isu keamanan nonkonvensional adalah ketahanan pangan dan energi, ekonomi, maupun lingkungan. Mengutip apa yang dijabarkan oleh John Baylis dan Steve Smith (2005) dalam bukunya, isu-isu nonkonvensional tersebut antara lain adalah:

1. *Environmental Issues* (hal. 451-475);
2. *Terrorism and Globalization* (hal. 479-495);
3. *Poverty, Development, and Hunger* (hal. 645-667);
4. *Gender Issues* (hal. 669-686); dan
5. *Human Rights* (hal. 689-702).

Hal senada juga dapat disimak dari penjabaran John T. Rourke (2005) yang secara gamblang menyebutkan isu-isu nonkonvensional tersebut sebagai “*bentuk kepedulian nyata yang seharusnya kita kembangkan dalam melestarikan dan memperkuat kesamaan-kesamaan universal manusia (Preserving and Enhancing Global Commons)*”.¹⁰ Isu-isu nonkonvensional tersebut antara lain, yaitu:

1. *World expanding population*;
2. *The depletion of natural resources*;
3. *The increase of chemical discharges into the environment*; dan
4. *The impact of these trends on the global biosfer*.

Menurut Rourke pada awal argumennya dalam buku yang sama, isu-isu tersebut “*in many ways it is an extension of the human rights issues*”.¹¹

Sementara itu, Samuel P. Huntington (1997 dalam bab VIII bukunya melandaskan teori bahwa *the clash of civilizations* antara Barat (*the West*), terutama AS

⁹ Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 34.

¹⁰ John T. Rourke, *op.cit.*, hlm. 511.

¹¹ *Ibid*

dan negara-negara non-*West* adalah karena *Western* memosisikan dirinya berpegang teguh pada nilai-nilai Barat seperti demokrasi, pasar bebas, pembagian kekuasaan pemerintahan (*limited government*), hak asasi manusia, individualisme, dan hukum, kemudian mempromosikannya secara masif kepada negara-bangsa non-*West* tersebut.¹²

Keamanan penduduk (*human security*) dari berbagai bentuk ancaman nonkonvensional kini telah menjadi sama pentingnya dengan keamanan (pertahanan dan tingkat kekuatan militer) suatu negara. Hal ini dikarenakan isu-isu nonkonvensional telah menjadi isu global sehingga stabilisasi domestik dan politik suatu negara pasti akan menerima implikasinya.

Secara teori, isu-isu nonkonvensional dalam dinamika politik internasional mengacu pada *isu-isu internasional di luar isu kekuatan militer negara yang dapat memengaruhi dinamika politik internasional maupun segala macam bentuk negosiasi antarnegara dan/atau non-state actors atas promosi nilai-nilai tertentu dengan tujuan tertentu*. Dapat diasumsikan bahwa isu-isu nonkonvensional mengandung beberapa makna penting berikut:

1. *Global Commons dan National(s) Interest*

Setiap negara di dunia pasti memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Pada praktiknya, *issues/values* yang dipromosikan bersama-sama kemudian dikembangkan demi kepentingan global (kemanusiaan), dan setidaknya menguntungkan dalam tingkat regional (negara-negara tertentu yang bekerja sama secara aktif dan memiliki kesamaan visi atau ideologi).

2. Tingkat kekuatan *issues/values* yang dipromosikan pada level internasional

Tidak semua isu, nilai, atau muatan nonkonvensional dapat dikatakan sebagai isu-isu nonkonvensional yang dapat berpengaruh signifikan pada level internasional. Isu-isu nonkonvensional tersebut haruslah berdaya jangkau luas atau setidaknya mewarnai proses negosiasi dan/atau dinamika politik internasional.

3. Usaha perjuangan keadilan atau bentuk resistensi/perlawanan (*counter issue*) terhadap isu/kekuatan *mainstream*

¹² Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, (New York: Simon & Schuster Inc., 1997), hlm. 184.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa isu nonkonvensional yang muncul pada tingkat internasional, dan menantang kekuatan *mainstream*. Isu gender, contohnya. Perjuangan gender berusaha menuntut keadilan sistem bagi para perempuan sedunia yang selama ini dikeluhkan bahwa dunia didominasi oleh kekuatan maskulin, dan bahwa sistem *mainstream* mengenyampingkan atau memarginalkan peran perempuan.

Berikut tabel 1.1 yang menjelaskan tentang isu konvensional dan isu nonkonvensional dalam dinamika politik internasional:

Tabel 1.1 Perbandingan Isu Konvensional dan Non Konvensional
Dalam Dinamika Politik Internasional

Isu	Tema sentral	Aktor
Militer (Tradisional/konvensional)	Strategi dan kebijakan pertahanan, kerjasama militer, pakta pertahanan, <i>security community</i> (regionalisme/aliansi), kebijakan luar negeri, konflik antarnegara, hubungan diplomatik, dll.	Negara
Keamanan nonmiliter / nonkonvensional	Aktivitas NGO, <i>illegal migrant</i> , <i>human trafficking</i> , lingkungan hidup, <i>transnational crime</i> , kemiskinan, kemanusiaan, gender, dll.	Negara dan masalah nonnegara; NGO, MNC, dan individu

Sumber: Yulius P. Hermawan *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

III. Sikap Dunia Internasional Terhadap Isu Global Warning

Isu ekologi/lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Dunia mengenai Lingkungan Hidup (*Global Conference on the Human Environment*) di bawah naungan PBB tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi ini diwarnai dengan tuduhan-tuduhan politik kepada beberapa negara yang dianggap menggunakan senjata kimia pemusnah massal dan

pengrusakan lingkungan hidup. Meskipun dinilai kurang berhasil dalam meningkatkan kerja sama internasional secara konkret, namun Konferensi Dunia di Stockholm berhasil menetapkan landasan sistem pemantauan lingkungan hidup dunia, program tindakan dan deklarasi, mekanisme pengawasan PBB, serta yang terpenting adalah adanya pengakuan dramatis akan perlunya kerja sama internasional dan terbentuknya mekanisme fungsional.¹³

Semenjak pertemuan Stockholm, industrialisasi global yang cepat dan meningkatnya penggunaan pupuk sintesis guna memajukan pertanian telah menimbulkan kekhawatiran baru mengenai ekologi di Dunia Ketiga.¹⁴ Bencana ekologi akibat ulah manusia yang menimpa negara-negara maju jumlah dan pengaruhnya juga tidak kecil. Di antaranya, seperti Tragedi *Love Canal* di New York, kebocoran nuklir *Three Mile Island* di Pennsylvania, meledaknya fasilitas penyimpanan gas di Mexico City (1984), kebocoran bahan kimia di Bhopal, India (1985), dan yang paling terkenal tragedi Chernobyl di Uni Soviet. Bencana-bencana barusan diperparah dengan isu *Global Warming* atau yang populer dikenal sebagai efek rumah kaca.

Pada akhir tahun 1980-an, dunia internasional sudah menunjukkan perhatian yang serius terhadap efek rumah kaca yang diakibatkan oleh pelepasan gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida (CO₂), metan, Nitrooksida, dan freon yang terjebak di lapisan atmosfer bumi. Kekhawatiran dunia internasional mengindikasikan betapa seriusnya ancaman *Global Warming* dan perubahan iklim yang sudah di depan mata. Dua dasawarsa setelah Konferensi Dunia di Stockholm, isu lingkungan hidup diangkat kembali dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Konferensi Rio yang juga dikenal sebagai "*The Earth Summit*" merupakan salah satu pertemuan internasional terbesar yang melibatkan 150 negara, 135 kepala negara dalam satu panggung, diikuti sekitar 45.000 orang partisipan, diliput oleh lebih dari 10.000 jurnalis, dan lebih dari 1500 perwakilan NGO yang mengurus bermacam-macam bidang termasuk lingkungan hidup, organisasi bisnis dan pengembangan, *women caucus*, dan kelompok *indigenous people*.¹⁵ Konferensi Rio melahirkan kesepakatan-

¹³ Walter S. Jones, *op.cit.*, hlm. 478.

¹⁴ Bassow Whitman, "The Third World: Changing Attitudes Toward Environmental Protection", dalam *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Juli 1979, hlm. 112-120.

¹⁵ Owen Greene, "Environmental Issues", dalam *The Globalization of World Politics*, *op.cit.*, hlm. 468.

kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Rio, Agenda 21, Deklarasi Kehutanan (*The Forest Principles*), Konvensi Keanekaragaman Biota Biologis (*The Convention on Biological Diversity*), Konvensi Melawan Proses Penggurunan (*The Convention to Combat Desertification*), dan Konvensi Perubahan Iklim (*The Framework Convention on Climate Change/ FCCC*). Secara garis besar, Konferensi Rio 1992 dinilai sukses oleh banyak kalangan. Akan tetapi, sesungguhnya kesuksesan kesepakatan dan konvensi *the Earth Summit* berpulang kepada masing-masing negara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan programnya secara konsisten dari waktu ke waktu.

Berhubung kesepakatan internasional masih bersifat normatif, implementasi Deklarasi Rio kurang atau belum dijalankan oleh para konstituennya, terutama negara-negara industrial besar. Inilah yang ingin diperjuangkan oleh dunia internasional melalui Protokol Kyoto tahun 1997 yang menawarkan solusi legalitas komitmen internasional terhadap pembatasan emisi karbon yang dihasilkan oleh negara-negara industri. Uni Eropa, AS, dan Jepang sepakat untuk mengurangi emisi karbonnya setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2008. Protokol Kyoto melahirkan badan-badan mekanisme dan sistem fleksibilitas pengurangan emisi karbon baru, seperti *Joint Implementation* (kerja sama negara-negara industri untuk saling berbagi emisi karbon yang dihasilkan), *Emissions Trading* (kesepakatan niaga ‘mengeksport’ emisi karbon suatu negara industri ke negara lain yang mempunyai kuota berlebih terkait emisi karbon), dan *Clean Development Mechanism* (kerja sama negara-negara industri dan negara-negara berkembang dalam hal pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan).

Konferensi internasional tentang Global Warming dan perubahan iklim yang terjadi baru-baru ini di antaranya adalah Konferensi *Climate Change* di Bali (2007) dan KTT G-8 plus 8 di Hokkaido, Jepang (Juli 2008). Kedua konferensi tingkat internasional ini tidak mengalami kemajuan berarti dalam hal penanganan *Global Warming* dan perubahan iklim dikarenakan perbedaan kepentingan mendasar yang masih kental mewarnai negosiasi forum negara maju dan negara-negara berkembang. Perbedaan-perbedaan mendasar itu antara lain mencakup ketahanan pangan nasional, subsidi pertanian, liberalisasi sektor pertanian dan perdagangan, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan limbah yang dihasilkan, serta Iptek, dan kekuatan finansial nasional.

Beberapa contoh pihak yang terlibat dalam promosi dan/atau dalam penanganan isu Global Warming dan perubahan iklim, antara lain:

1. Al Gore

Al Gore merupakan mantan wakil presiden Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bill Clinton sejak 1993 sampai dengan 2001. Dia merupakan tokoh populer yang sangat gencar dalam mempromosikan isu Global Warming kepada masyarakat awam, khususnya para kaum remaja dunia. Salah satu karyanya yang terkenal, yaitu DVD laris *The Unconvenient Truth* yang menyajikan informasi-informasi mengejutkan seputar dampak negatif akibat Global Warming. Pada 12 Oktober 2007, Al Gore diumumkan sebagai pemenang anugerah Penghargaan Perdamaian Nobel bersama dengan *Intergovernmental Panel on Climate Change* untuk usaha mereka dalam membangun dan menyebarkan pengetahuan mengenai perubahan iklim yang disebabkan manusia, serta merintis langkah-langkah yang diperlukan untuk melawan perubahan tersebut."

2. PBB melalui *United Nations of Environmental Protection* (UNEP)

3. PBB melalui *United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC)

Tugas utama IPCC, yakni meneliti dan mengumpulkan data atau informasi-informasi terkait seputar perubahan iklim global. Salah satu laporan IPCC yang menegaskan tentang pentingnya perhatian dunia internasional terhadap isu *global warming* dan *climate change*, yaitu laporan IPCC bulan Februari 2007.¹⁶

4. *World Meteorological Organization* (WMO)

5. Media-media massa terkenal seperti *National Geographic*

6. Badan/Departemen Pemerintahan negara-negara dunia yang secara khusus menangani isu kebijakan energi dan/atau *Global Warming* dan perubahan iklim. Institusi-institusi formal semacam ini lazim terdapat di beberapa negara seperti AS, China, dll.

Beberapa negara yang sudah mengimplementasikan kebijakan pengurangan emisi karbon, antara lain:

¹⁶ Kesimpulan utama laporan IPCC pada bulan Februari 2007, yaitu "*Fossil fuel use, agriculture, and land-use change are fundamentally affecting the systems on our planet,*" kata Achim Steiner, direktur eksekutif IPCC, saat jumpa pers di Paris bulan Maret 2007.

1. Brazil

Brazil menggalakkan program bio-etanol secara besar-besaran demi mengurangi ketergantungannya terhadap minyak fosil dan pengurangan emisi karbon.¹⁷

2. Uni Eropa

Pada tahun 2007, KTT Uni Eropa telah menyepakati bahwa semua negara anggota Uni Eropa harus pro-aktif dalam merumuskan kebijaksanaan energi jangka panjang untuk menghentikan *Global Warming*. Negara-negara Uni Eropa juga sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk meningkatkan penggunaan sumber energi yang dapat terus dihasilkan, sedikitnya 20 persen menjelang tahun 2020. Rencana itu mencakup sasaran-sasaran yang secara hukum mengikat, yang ditetapkan oleh para anggota kelompok yang beranggotakan 27 negara itu.¹⁸

IV. KESIMPULAN

Global Warming dan perubahan iklim merupakan salah satu isu nonkonvensional yang menjadi wacana dan perhatian dunia internasional. Hal ini ditandai dengan menjamurnya dan semakin intensnya konferensi-konferensi tingkat internasional yang membahas isu ini. Secara garis besar, negosiasi internasional mengenai *Global Warming* dan perubahan iklim melibatkan dua kubu utama, yaitu negara-negara maju (negara industri) dan negara-negara berkembang.

Dilema besar dalam isu *Global Warming* dan perubahan iklim, yaitu pembangunan ekonomi global dan kualitas lingkungan hidup yang berada pada kutub yang sama. Pembangunan ekonomi dengan mengeksploitasi alam secara besar-besaran menimbulkan dampak-dampak negatif yang tidak kecil pengaruhnya. Seringkali, seperti yang sudah menjadi tren kontemporer, masalah ekologi yang terjadi di suatu wilayah kemudian meluas ke wilayah/negara lain, dan menjadi masalah internasional. Dunia menjadi sempit seiring berjalannya waktu.¹⁹ Inilah yang kemudian melahirkan kesadaran

¹⁷ Dapat dibaca di <http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=6555>.

¹⁸ <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-03/2007-03-10-voa5.cfm>

¹⁹ Kita dapat mengambil contoh kasus dari China yang merupakan salah satu industri manufaktur terbesar di dunia saat ini, dan melepaskan begitu banyak emisi karbon yang jumlahnya hanya beda tipis dengan Amerika Serikat. Informasi terkait dapat disimak dari buku laporan investigasi Ted C. Fishman, *China Inc.* cetakan keempat, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Januari 2007), terutama bab VII.

global untuk saling bekerja sama dalam menangani isu *Global Warming* dan perubahan iklim.

Meskipun terkadang mengalami kemandekan, konferensi internasional tentang *Global Warming* dan perubahan iklim terus dilakukan oleh negara-negara di dunia demi mencapai *win-win solution*. PBB sebagai NGO terbesar di dunia tidak pernah berhenti dalam memediasi negosiasi dan meneliti *Global Warming*. Hal ini semata-mata demi mencapai tujuan dasarnya, yakni pencapaian kesejahteraan dan perdamaian dunia yang sesungguhnya. Dinamika internasional ini sangat menarik untuk kita simak, dan tentunya juga harus kita perjuangkan. Sebab program melawan *Global Warming* dan perubahan iklim menuntut peran serta segenap manusia yang hidup di dalam bumi, implikasinya pun pasti akan berdampak langsung kepada seluruh manusia di bumi. Dalam level pemerintahan negara sekaligus berkaca dari *individual analysis*, tentunya kualitas dan minat para pemimpin negara dunia terhadap isu *Global Warming* dan perubahan iklim juga sangat mempengaruhi dinamika politik internasional terkait.²⁰

²⁰ Kualitas keilmuan memengaruhi kepribadian kepemimpinan dalam menentukan pemilihan strategi. Lihat khususnya Harold D. Lasswell, *Psychopathology and Politics* (Chicago: University of Chicago Press, 1930) dan *Power and Personality* (New York: Norton, 1948).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Baylis, John&Steve Smith. *The Globalization of World Politics* Third Edition. New York: Oxford University Press, 2005.
- Fishman, Ted C. *China Inc.* cetakan keempat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Januari 2007.
- Hermawan, Yulius P. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster Inc., 1997.
- Jones, Walter S. *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan Tatanan Dunia volume dua*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Lasswell, Harold D. *Power and Personality*. New York: Norton, 1948.
- Lasswell, Harold D. *Psychopathology and Politics*. Chicago: University of Chicago Press, 1930.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Edisi Kedua*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2005.
- Nye, Joseph S. Jr. *Understanding International Conflicts Second Edition*. New York: Longman Inc., 1997.
- Rourke, John T. *International Politics on the World Stage Tenth Edition*. New York: McGraw Hill Inc., 2005.
- Whitman, Bassow. "The Third World: Changing Attitudes Toward Environmental Protection", dalam *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Juli 1979.

Internet:

- <http://www.dictionary.cambridge.org/>
- <http://www.earthpolicy.org/>
- <http://www.ecoagriculture.org/>
- <http://www.news.nationalgeographic.com/>

<http://www.science.psu.edu/journal/Fall2002/Globalwarming-FA02.htm>

<http://www.un.org/english/>

<http://www.unep.org/>

<http://www.voanews.com/indonesian/archive/>

http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/040802_prngmodrn_li/

<http://www.worldwatch.org/>

<http://yaleglobal.yale.edu/>